

## 33 Pemberontak di Kongo Tewas dalam Operasi Militer

**KINSHASA(IM)** - Sebanyak 27 pemberontak, lima warga sipil dan seorang tentara tewas dalam operasi militer selama dua hari terhadap kelompok bersenjata terkenal di Kongo timur. Demikian pernyataan yang dikeluarkan pihak militer Kongo.

"27 anggota milisi CODECO yang terbunuh termasuk salah satu komandan utamanya, Malo-Maki," kata Letnan Jules Ngongo, juru bicara angkatan darat Kongo untuk wilayah Ituri.

"Di antara penduduk sipil, lima orang tewas dan dipenggal oleh CODECO, sementara seorang tentara tewas dalam pertempuran itu dan seorang lainnya terluka," imbuhnya seperti dikutip dari AFP, Rabu (24/3).

Ngongo mengatakan operasi militer itu diluncurkan pada Minggu setelah CODECO berusaha memutus jalan strategis, Highway 27, di kota perdagangan Iga-Barriere, hanya 25 kilometer dari ibu kota provinsi Ituri, Bunia.

CODECO - Kerjasama untuk Pembangunan Kongo - adalah sekte politik-agama bersenjata yang telah dikaitkan dengan lebih dari 1.000 kematian sejak Desember 2017.

Para ahli mengatakan

sekte itu terdiri dari berbagai kelompok milisi yang mengklaim membela etnis Lendu di Ituri, provinsi kaya emas yang berbatasan dengan Uganda dan Sudan Selatan.

Lendu telah mengalami konflik bersejarah dengan komunitas Hema - puluhan ribu orang di kedua belah pihak tewas dalam perang kejam antara 1999 dan 2003.

Pertempuran itu diakhiri berkat misi militer Uni Eropa, Operasi Artemis.

Lendu telah mengalami konflik bersejarah dengan komunitas Hema - puluhan ribu orang di kedua belah pihak tewas dalam perang kejam antara 1999 dan 2003.

Pertempuran itu diakhiri berkat misi militer Uni Eropa, Operasi Artemis.

Namun pertumpahan darah kembali terjadi pada akhir tahun 2017, dimulai di wilayah Djugu sebelum menyebar ke arah timur hingga ke Irumu, Mahagi dan Aru.

COEDECO hanyalah satu dari sekitar 122 kelompok bersenjata yang berkeliraran di Republik Demokratik Kongo timur, banyak dari mereka merupakan warisan perang pada tahun 1990-an yang menyedot negara-negara dari sekitar Afrika tengah. ● **gul**



LOKASI PENEMBAKAN MASSAL DI AS

Warga meninggalkan karangan bunga di lokasi penembakan massal di toko kelontong King Soopers di Boulder, Colorado, Amerika Serikat, Selasa (23/3).

## Penyelidik PBB Diancam Dibunuh oleh Pejabat Saudi

Ancaman itu terkait dengan hasil penyelidikan pembunuhan Khashoggi.

**RIYADH(IM)** - Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Agnes Callamard, mendapatkan ancaman kematian setelah menyelidiki pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi. Ancaman itu dilakukan oleh pejabat senior Arab Saudi dan dilakukan tidak hanya sekali.

Laporan the Guardian pada Selasa (23/3) menyatakan, Callamard mengaku mendapat info dari seorang rekan PBB

yang memberi tahunya pada Januari 2020 bahwa seorang pejabat Saudi mengancam dua kali dalam pertemuan dengan pejabat senior PBB lainnya di Jenewa. Pejabat itu ingin agar Callamard 'diamankan'.

Callamard pun mengaku diberitahu bahwa Saudi mengkritik pekerjaannya dalam penyelidikan Khashoggi. Saudi geram tentang penyelidikan dan kesimpulannya. Pejabat Saudi juga mengklaim Cal-

lamard menerima uang dari Qatar. Tuduhan tersebut sering kali digunakan terhadap kritik kepada Pemerintah Saudi.

Menurut Callamard salah satu pejabat senior Saudi yang berkunjung kemudian diduga mengatakan telah menerima panggilan telepon dari orang-orang yang siap untuk 'mengamankannya'.

Komentar itu dipahami sebagai ancaman kematian oleh rekan-rekannya. Sedangkan pihak Saudi meyakini mereka bahwa komentar tersebut tidak boleh dianggap serius.

Callamard diberitahu, kelompok Saudi kemudian menin-

ggalkan ruangan, tetapi pejabat senior Saudi yang berkunjung tetap tinggal. Dia mengulangi ancaman kepada pejabat PBB yang tersisa di ruangan itu.

"Orang-orang yang hadir, dan juga kemudian, menjelaskan kepada delegasi Saudi bahwa ini benar-benar tidak pantas dan ada harapan bahwa ini tidak boleh berlanjut," kata Callamard.

Callamard akan bergabung dengan pengawas hak asasi manusia Amnesty International sebagai sekretaris jenderal bulan ini. Dia adalah pejabat pertama yang menyelidiki pembunuhan jurnalis Washing-

ton Post yang dibunuh oleh agen Saudi di konsulat kerajaan di Istanbul pada Oktober 2018.

Dalam laporan 100 halaman yang diterbitkan pada Juni 2019, Callamard mengatakan, kematian Khashoggi merupakan pembunuhan di luar hukum yang menjadi tanggung jawab Negara Kerajaan Arab Saudi. Laporan itu juga mengatakan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) harus disidilki atas pembunuhan itu. Namun, Saudi mengatakan, Khashoggi meninggal dunia akibat operasi curang oleh agen dan MBS membantah memantahkan untuk melakukan itu. ● **tom**

## Biden Dorong Larangan Penggunaan Senjata Serbu

**WASHINGTON(IM)** - Untuk kedua kalinya dalam rentang waktu seminggu Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, kembali dihadapi oleh permasalahan penembakan massal. Ia pun mendorong larangan senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi.

"Kurang dari seminggu setelah pembunuhan mengerikan delapan orang dan serangan terhadap komunitas

AAPI di Georgia, sementara bendera masih berkibar setengah staf untuk tragedi itu, kota lain di Amerika telah terbuka oleh kekerasan senjata dan trauma yang diakibatkannya," ujar Biden terkait penembakan di Boulder, Colorado, yang menewaskan 10 orang seperti dikutip dari ABC News, Rabu (24/3).

Ia pun meminta Kongres AS untuk segera mengesahkan undang-undang pengendal-

ian senjata. "Saya tidak perlu menunggu satu menit lagi, apalagi satu jam, untuk mengambil langkah-langkah akal sehat yang akan menyelamatkan nyawa di masa depan, dan untuk mendesak rekan-rekan saya di DPR dan Senat untuk bertindak," kata Biden, mengutip dua RUU yang disahkan di DPR hanya 12 hari yang lalu menutup celah dalam sistem pemeriksaan latar belakang

untuk membeli senjata. RUU tersebut memiliki sedikit peluang untuk disahkan di Senat, di mana 60 suara akan diperlukan. "Kita bisa melarang senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi di negara ini sekali lagi. Saya menyelesaikannya ketika saya menjadi senator. Itu disahkan, itu adalah hukum untuk waktu yang lama dan itu mengurangi pembunuhan massal ini. Kita harus melakukannya

lagi," tambah presiden seperti dikutip dari Russia Today.

Sepuluh orang, termasuk satu petugas polisi, tewas dalam serangan di supermarket King Soopers di Boulder pada Senin sore waktu setempat. Polisi mengidentifikasi tersangka sebagai Ahmad Al Aliwi Al-Issa (21) tak lama sebelum Biden menyampaikan sambutannya di Gedung Putih pada hari Selasa (2/3). ● **ans**

## PBB akan Kumpulkan Bukti Kejahatan Perang di Sri Lanka

**JENEWA(IM)** - Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, menerima mandat untuk mengumpulkan bukti kejahatan selama perang saudara yang panjang di Sri Lanka, Selasa (23/3). Perang tersebut telah berakhir pada 2009 dengan kekalahan milisi Tiger Tamil dan meningkatnya kematian warga sipil.

Dewan hak asasi yang berbasis di Jenewa mengadopsi resolusi yang dipelopori oleh Inggris. Pemungutan suara tersebut menghasilkan 22 suara, dengan 11 menolak termasuk China dan Pakistan dan 14 abstain termasuk negara tetangga India.

"Impunitas menjadi lebih mengakur, kemajuan dalam kasus-kasus simbolik telah terhenti," kata duta besar Inggris untuk PBB, Julian Braithwaite.

Braithwaite menyampaikan teks tersebut untuk mewakili sebuah kelompok termasuk Kanada, Jerman, Malawi, Montenegro dan Makedonia Utara. Keputusan itu memberi kantor Bachelet staf baru, kekuasaan, dan anggaran senilai 2,8 juta dolar AS untuk menyelidiki perang Sri Lanka dengan tujuan untuk penuntutan di masa depan.

PBB melaporkan, 80 ribu-100 ribu orang tewas dalam konflik 26 tahun di negara itu. Milisi berusaha untuk membuat negara bagian terpisah untuk minoritas Tamil dan menuduh kedua belah pihak melakukan kejahatan perang. "Ini sangat penting bagi para korban," kata pengacara hak asasi, Yasmin Sooka.

"Ini benar-benar pengakuan bahwa di tingkat domestik, proses telah gagal dan tidak ada harapan nyata bahwa para korban akan mengakses keadilan," kata sosok yang terlibat dalam penuntutan sipil

terhadap Presiden Sri Lanka saat ini, Gotabaya Rajapaksa, atas tuduhan kejahatan perang.

Pada konferensi pers di ibu kota Sri Lanka, Colombo, Menteri Luar Negeri, Dinesh Gunewardena, mengatakan resolusi itu tidak memiliki otoritas karena lebih banyak negara yang memilih menentang atau abstain daripada mendukung. Resolusi itu, dinilai, dibawa oleh negara-negara yang didukung oleh kekuatan Barat yang ingin mendominasi Dunia Selatan. Utusan Sri Lanka untuk PBB, C.A. Chandraprema, menyebut teks itu tidak membantu dan memecah belah.

Bachelet pada Januari telah mendesak negara-negara ambil bagian untuk menjatuhkan sanksi pada mantan komandan militer Sri Lanka, termasuk panglima militer saat ini yang dicurigai terkait dengan kekejaman selama bagian akhir perang. Rajapaksa yang menjabat sebagai kepala pertahanan masa perang negara itu, telah mempertahankan ketidakbersalahannya dan kasus tersebut. Dia memperoleh kekebalan dari menjadi presiden pada 2019.

Resolusi forum PBB juga menyatakan kekhawatiran atas tanda-tanda baru penurunan hak di Sri Lanka. Kondisi tersebut termasuk menempatkan perwira militer yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi pemerintahan sipil, erosi independensi peradilan, dan impunitas dan hambatan politik atas pertanggungjawaban atas kejahatan.

"Resolusi ini harus mengirimkan pesan yang jelas kepada para pelaku kejahatan masa lalu dan saat ini bahwa mereka tidak dapat terus bertindak tanpa hukuman," kata perwakilan kelompok hak asasi Amnesty International untuk PBB di Jenewa, Hilary Power. ● **gul**

## PM Australia Meminta Maaf karena Lontarkan Tuduhan Pelecehan

**CANBERRA(IM)** - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison secara terbuka meminta maaf karena melontarkan tuduhan pelecehan yang tidak berdasar pada satu perusahaan media.

Tuduhan itu diungkapkan saat Morrison membela cara penanganannya atas skandal perlakuan buruk terhadap perempuan dalam politik dan partainya.

Pada konferensi pers Selasa (23/3), Morrison mengatakan dia akan mendorong perubahan budaya di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik atas serangkaian tuduhan tentang pelecehan terhadap wanita.

CEO News Corp Australia, Michael Miller, langsung menolak klaim Morrison tersebut. Surat kabar dari kelompok media yang umumnya mendukung pemerintah konservatif itu pun memuat halaman depan yang mengkritik PM

Australia pada Rabu (24/3). "Saya menerima keberatan mereka. Saya salah mengatakannya, emosi saat ini bukan alasan," papar Morrison dalam posting di Facebook pada Selasa malam.

Perselisihan itu menggagalkan upaya Morrison memperbaiki posisinya di hadapan para pemilih, khususnya wanita yang telah marah dengan bagaimana dugaan pemerkosaan terhadap seorang staf pemerintah muda oleh anggota staf pemerintah lainnya pada awalnya dilihat sebagai masalah politik daripada kasus pidana.

"Para pemilih mengagumi ketika para pemimpin menyadari kegagalan dan meminta maaf," ujar Haydon Manning, profesor ilmu politik di Universitas Flinders, Australia Selatan.

"Tuduhan palsu ini, bagaimanapun, merusak apa yang dia coba capai," papar dia.

Masalah ketidaksiaraan gender mendorong puluhan

ribu orang berkumpul di sekitar Australia pekan lalu dan menyebabkan penurunan popularitas Morrison dalam berbagai jajak pendapat.

Morrison mendapat kritik karena menolak bertemu dengan para pengunjung rasa di luar Gedung Parlemen.

Morrison mengatakan dia akan mengumumkan serangkaian tindakan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam politik dalam beberapa pekan mendatang.

Dia juga mengisyaratkan dapat mendukung kuota kandidat perempuan untuk Partai Liberal pada pemilu berikutnya, yang dijadwalkan pada pertengahan 2022.

Anggota parlemen perempuan dari Partai Liberal yang berkuasa dan dipimpin Morrison, kurang dari sepertiga.

Jumlah itu berbeda dengan perwakilan perempuan hampir 50% di kubu oposisi Partai Buruh. ● **tom**



PERAYAAN LATHMAR HOLI - INDIA

Seorang pria melindungi diri dari sejumlah wanita, yang berpura-pura memukulinya dengan batang bambu pada perayaan Lathmar Holi, ditengah penyebaran virus corona (COVID-19), di kota Barsana, wilayah utara negara bagian Uttar Pradesh, India, Selasa (23/3).

## Gadis 7 Tahun Tewas Ditembak Pasukan Keamanan Myanmar

**YANGON(IM)** - Seorang gadis berusia tujuh tahun ditembak mati oleh pasukan keamanan di Myanmar, menjadi korban termuda yang diketahui dalam tindakan brutal pasukan keamanan menyusul kudeta militer bulan lalu.

Anggota keluarga mengatakan gadis itu dibunuh di rumahnya di kota Mandalay. Kelompok hak asasi Save the Children mengatakan lebih dari 20 anak termasuk di antara lusinan orang yang telah terbunuh.

Staf di layanan pemukiman Mandalay mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa anak berusia tujuh tahun itu meninggal karena luka tembak di Kotapraja Chan Mya Thazi. Outlet media lokal Myanmar Now melaporkan bahwa tentara menembak ayahnya, tetapi mengenai gadis kecil itu, yang duduk di pangkuan sang ayah di dalam rumah mereka.

Anak itu telah diidentifikasi sebagai Khin Myo Chit. Pekerja bantuan mengatakan tim penyelamat bergegas untuk mendapatkan perawatan medisnya, tetapi tidak dapat menyelamatkannya.

Anggota keluarga mengatakan saudara laki-lakinya yang berusia 19 tahun juga ditangkap.

Militer belum mengomentari laporan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Save the Children mengatakan pihaknya "ngeri" dengan kematian gadis itu, yang terjadi sehari setelah seorang bocah lelaki berusia 14 tahun dilaporkan ditembak mati di Mandalay.

"Kematian anak-anak ini sangat memprihatinkan mengingat mereka dilaporkan dibunuh saat berada di rumah, di mana mereka seharusnya aman dari bahaya. Fakta bahwa begitu banyak anak dibunuh hampir setiap hari sekarang menunjukkan pengabaian yang sama sekali terhadap manusia. hidup oleh pasukan keamanan," kata kelompok itu.

Militer sebelumnya pada Selasa (23/3/2021) menyatakan kesedihan atas kematian para pengunjung rasa, tetapi menyalahkan mereka karena memicu anarki di Myanmar. Seorang juru bicara militer mengatakan demonstran anti kudeta bertanggung jawab atas tindakan kekerasan dan pembakaran.

Secara total, militer mengatakan 164 orang telah tewas dalam protes, sementara kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebutkan korban tewas setidaknya 261. ● **gul**



BANJIR AUSTRALIA  
Wilayah terdampak banjir terlihat dari helikopter di Windsor dekat Sydney, Australia, Rabu (24/3).